

## MANAJEMEN KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN DERADIKALISASI: MENJEMBATANI KESENJANGAN ANTARA TEORI TOLERANSI DAN PRAKTIK LAPANGAN

Samsul Hadi

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah Karya Pembangunan Paron Ngawi

[hadi39645@gmail.com](mailto:hadi39645@gmail.com)

Diterima : 17-02-2026

Disetujui : 07-03-2026

Diterbitkan : 30-04-2026

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen kurikulum dalam pendidikan deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) serta menjelaskan bagaimana kurikulum berbasis toleransi menjembatani kesenjangan antara konsep toleransi dan praktik lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kurikulum deradikalisasi di YLP dilaksanakan secara holistik melalui tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang mengintegrasikan nilai toleransi, moderasi beragama, pemberdayaan ekonomi, dan reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut berkontribusi dalam membangun pemahaman keagamaan yang lebih moderat, meningkatkan partisipasi sosial, serta mendukung kemandirian ekonomi peserta. Temuan ini menegaskan bahwa manajemen kurikulum dalam pendidikan deradikalisasi tidak hanya berfungsi sebagai sistem pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa penguatan model manajemen kurikulum deradikalisasi yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan bagi pengembangan pendidikan toleransi di Indonesia.

**Kata kunci:** Manajemen Kurikulum, Deradikalisasi, Pendidikan Toleransi, Moderasi Beragama, Reintegrasi Sosial

**Abstract:** This study aims to analyze curriculum management in deradicalization education at the Lingkar Perdamaian Foundation (YLP) and explain how a tolerance-based curriculum bridges the gap between theory and field practice. This research employs a qualitative approach with a descriptive case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using an interactive model. The findings reveal that curriculum management in deradicalization education at YLP is implemented holistically through integrated stages of planning, implementation, and evaluation, incorporating values of tolerance, religious moderation, economic empowerment, and social reintegration. This approach effectively transforms radical ideologies into moderate perspectives, enhances social participation, and promotes economic

*independence among participants. The study highlights that curriculum management functions not only as an educational system but also as an effective instrument of social transformation. This research contributes a contextual, adaptive, and sustainable curriculum management model for strengthening tolerance-based education in Indonesia.*

**Keywords:** Curriculum Management, Deradicalization, Tolerance Education, Religious Moderation, Social Reintegration

## PENDAHULUAN

Deradikalisasi berbasis pendidikan merupakan salah satu pendekatan penting dalam upaya mencegah keberulangan ekstremisme kekerasan serta mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme. Pendekatan ini tidak hanya menekankan perubahan pemahaman keagamaan, tetapi juga mencakup pembinaan sikap, pemulihan relasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan identitas kebangsaan. Dalam konteks tersebut, kurikulum memiliki posisi strategis karena menjadi instrumen yang mengarahkan proses pembelajaran, pendampingan, internalisasi nilai toleransi, serta pembentukan perilaku sosial yang lebih moderat dan inklusif.

Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) Lamongan merupakan salah satu lembaga berbasis komunitas yang memiliki perhatian terhadap proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme. YLP mengembangkan pendekatan pendidikan yang memadukan nilai toleransi, moderasi beragama, Islam *rahmatan lil 'alamin*, pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan sosial. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan kurikulum deradikalisasi tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti stigma masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme, keterbatasan sumber daya, kebutuhan pendampingan yang berkelanjutan, serta kemungkinan pengaruh jaringan ekstremis yang masih aktif (Soniya & Yani, 2022; Sahar & Kaunert, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurikulum deradikalisasi tidak cukup hanya dirancang secara konseptual, tetapi juga perlu dikelola secara adaptif sesuai dengan kebutuhan peserta dan dinamika sosial di lapangan.

Manajemen kurikulum dalam pendidikan deradikalisasi perlu memperhatikan keterpaduan antara perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum harus didasarkan pada analisis kebutuhan peserta, latar belakang ideologis, kondisi psikososial, serta kebutuhan reintegrasi ekonomi dan sosial. Implementasi kurikulum perlu menggabungkan dialog keagamaan, penguatan toleransi, pembinaan spiritual, kegiatan sosial, serta pelatihan keterampilan. Sementara itu, evaluasi kurikulum diperlukan untuk menilai perubahan pemahaman, sikap, perilaku, dan tingkat partisipasi sosial peserta. Tanpa sistem evaluasi yang berkelanjutan, proses transformasi ideologis berisiko tidak terpantau secara memadai dan sulit dijadikan dasar perbaikan program (Lyons et al., 2021; Mennenga, 2021).

Penelitian mengenai deradikalisasi berbasis pendidikan telah berkembang dalam berbagai perspektif. Kruglanski et al. (2021) menekankan pentingnya perubahan kognitif, motivasional, dan jaringan sosial dalam proses deradikalisasi. Namun, kajian tersebut belum secara spesifik membahas bagaimana perubahan tersebut dapat dikelola melalui desain dan implementasi kurikulum pendidikan. Rabasa et al. (2019) mengkaji strategi deradikalisasi dari sudut pandang kebijakan dan keamanan, tetapi belum memberikan perhatian memadai terhadap peran kurikulum sebagai perangkat transformasi sosial. Nurdin (2020) menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan moderasi beragama dan praktik pembelajaran, yang mengindikasikan pentingnya penguatan kurikulum dalam internalisasi nilai toleransi. Sementara itu, Mulyadi dan Kurniawan (2022) menemukan bahwa program deradikalisasi pasca-lapas sering menghadapi persoalan keberlanjutan karena belum didukung oleh sistem pendidikan dan pendampingan yang terstruktur.

Kajian lain juga menunjukkan pentingnya dukungan sosial dan pendekatan komunitas dalam proses reintegrasi mantan ekstremis. Hasan dan Rahim (2023), misalnya, menyoroti efektivitas pendidikan perdamaian berbasis komunitas dalam membangun kembali hubungan sosial. Lyons et al. (2021) menegaskan bahwa dukungan sosial menjadi faktor penting dalam proses reintegrasi mantan ekstremis. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara mendalam menjelaskan bagaimana

kurikulum dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi untuk mendukung proses deradikalisasi. Di sisi lain, Mennenga (2021) menekankan pentingnya kolaborasi multistakeholder, tetapi belum mengaitkannya secara operasional dengan manajemen kurikulum pendidikan deradikalisasi.

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat celah penelitian pada aspek manajemen kurikulum deradikalisasi, terutama yang mengintegrasikan dimensi ideologis, spiritual, sosial, ekonomi, dan evaluatif secara utuh. Sebagian penelitian terdahulu masih terfragmentasi pada isu perubahan ideologi, kebijakan keamanan, moderasi beragama, atau reintegrasi sosial secara terpisah. Padahal, dalam praktik lembaga berbasis komunitas seperti YLP, proses deradikalisasi berlangsung melalui perpaduan berbagai aspek tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji manajemen kurikulum deradikalisasi secara holistik melalui integrasi desain, implementasi, dan evaluasi kurikulum berbasis toleransi dalam konteks praktik lapangan di Yayasan Lingkar Perdamaian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen kurikulum dalam pendidikan deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian, khususnya bagaimana perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum berbasis toleransi digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara konsep toleransi dan praktik lapangan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi komponen utama kurikulum yang berperan dalam proses transformasi ideologis, penguatan sikap moderat, pemberdayaan ekonomi, dan reintegrasi sosial peserta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam merumuskan model kurikulum deradikalisasi yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik manajemen kurikulum dalam pendidikan deradikalisasi di Yayasan

Lingkar Perdamaian (YLP), khususnya terkait perencanaan, implementasi, evaluasi, serta kontribusinya terhadap transformasi ideologis dan reintegrasi sosial peserta. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, proses, dan pengalaman partisipan dalam konteks sosial yang alamiah (Creswell, 2016). Sementara itu, desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu lembaga tertentu sehingga memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap praktik manajemen kurikulum deradikalisasi (Yin, 2018).

Penelitian dilakukan di Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) Lamongan. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam program deradikalisasi, meliputi pengelola YLP, fasilitator, dan peserta program. Pengelola YLP dipilih karena memiliki peran dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan program, fasilitator dipilih karena terlibat langsung dalam implementasi kegiatan, sedangkan peserta program dipilih untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka mengikuti proses pendidikan deradikalisasi dan reintegrasi sosial.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai desain kurikulum, strategi implementasi, bentuk evaluasi, serta tantangan dalam pelaksanaan program. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik pendidikan deradikalisasi, seperti dialog keagamaan, pembinaan toleransi, kegiatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Dokumentasi digunakan untuk menelaah data pendukung, seperti profil lembaga, catatan kegiatan, materi pembinaan, dan dokumen program yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan secara naratif untuk menemukan pola temuan mengenai manajemen kurikulum deradikalisasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pengelola, fasilitator, dan peserta program. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data wawancara, observasi, dan

dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk memperoleh konsistensi temuan (Denzin, 2017; Miles et al., 2014).

Karena penelitian ini berkaitan dengan isu sensitif, identitas informan dijaga kerahasiaannya. Setiap data yang diperoleh digunakan hanya untuk kepentingan akademik, dan penyajian informasi dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan stigma terhadap peserta program deradikalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan Deradikalisasi**

Manajemen kurikulum dalam pendidikan deradikalisasi merupakan pendekatan strategis yang berfokus pada pengelolaan sistem pembelajaran untuk mengubah pola pikir radikal menjadi moderat dan toleran. Melalui integrasi nilai-nilai keagamaan, sosial, dan kemanusiaan, kurikulum dirancang secara holistik agar mampu menjawab tantangan ideologi ekstrem. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga transformasi sikap dan perilaku menuju kehidupan yang damai dan inklusif.

**Diagram 1 Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan Deradikalisasi**



Sumber: Hasil observasi dan dokumentasi penelitian, 2025.

Bagan “Manajemen Kurikulum dalam Pendidikan Deradikalisasi” pada Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) menggambarkan suatu model pengelolaan pendidikan yang bersifat holistik, sistematis, dan berbasis transformasi sosial yang berorientasi pada perubahan ideologis, perilaku, dan integrasi sosial mantan narapidana terorisme. Model ini diawali dari visi kelembagaan “merawat ukhuwah, merajut perdamaian” yang menjadi landasan normatif sekaligus arah strategis dalam seluruh proses pendidikan deradikalisasi, di mana tujuan akhirnya adalah membentuk individu yang moderat, toleran, dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif manajemen pendidikan, visi ini berfungsi sebagai guiding system yang mengarahkan seluruh tahapan kurikulum agar selaras dengan nilai-nilai perdamaian dan kebangsaan (Biyanto 2023). Tahap pertama dalam bagan tersebut adalah perencanaan kurikulum yang mencakup analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pengembangan kurikulum, penyusunan program, serta penyiapan sumber daya. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi peserta yang memiliki latar belakang ideologi radikal, sehingga kurikulum dirancang tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai alat rekonstruksi pemahaman keagamaan dan sosial (Kruglanski et al. 2021). Perumusan tujuan diarahkan pada internalisasi nilai toleransi, moderasi beragama, dan komitmen kebangsaan yang menjadi inti deradikalisasi berbasis pendidikan (Saputra et al. 2021). Pengembangan kurikulum dilakukan secara kontekstual dengan mengintegrasikan aspek ideologis, sosial, ekonomi, dan spiritual agar mampu menjawab kebutuhan riil peserta, sebagaimana ditegaskan bahwa kurikulum efektif harus relevan dengan konteks sosial peserta didik (Nurdin 2020). Penyusunan program dan penyiapan sumber daya juga menjadi kunci keberhasilan, karena keterlibatan fasilitator, masyarakat, dan mitra kelembagaan akan menentukan efektivitas implementasi kurikulum (Mennenga 2021).

Tahap kedua adalah pelaksanaan kurikulum yang merupakan inti dari proses transformasi deradikalisasi. Pada tahap ini, kurikulum diimplementasikan melalui

berbagai pendekatan, seperti re-edukasi ideologis, penguatan nilai toleransi, pemberdayaan ekonomi, reintegrasi sosial, dan pendampingan spiritual. Re-edukasi ideologis dilakukan melalui dialog keagamaan, klarifikasi pemahaman, dan kontra narasi terhadap ideologi radikal, yang secara empiris terbukti efektif dalam mengubah keyakinan ekstrem menjadi lebih moderat (Kruglanski et al. 2021). Penguatan nilai toleransi dilakukan melalui internalisasi sikap empati, penghargaan terhadap keberagaman, dan komitmen terhadap perdamaian, yang merupakan pilar utama dalam pendidikan moderasi beragama (Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI 2019; Hasan dan Rahim 2023). Pemberdayaan ekonomi menjadi dimensi penting karena faktor ekonomi sering kali menjadi akar keterlibatan dalam jaringan ekstremisme, sehingga pelatihan keterampilan dan kewirausahaan menjadi strategi untuk menciptakan kemandirian dan mengurangi potensi kembali pada ideologi radikal (Rabasa et al. 2019; Mulyadi dan Kurniawan 2022). Reintegrasi sosial dilakukan melalui pendampingan keluarga dan keterlibatan dalam aktivitas masyarakat, yang bertujuan membangun kembali kepercayaan sosial dan menghilangkan stigma terhadap mantan narapidana terorisme (Lyons, Lyons, dan Samson 2021). Selain itu, pendampingan spiritual melalui pembinaan keagamaan moderat menjadi aspek penting dalam membentuk identitas baru yang damai dan inklusif (Biyanto 2023). Seluruh proses implementasi ini menunjukkan bahwa kurikulum deradikalisasi tidak bersifat parsial, tetapi integratif dan berbasis pengalaman langsung.

Tahap ketiga adalah evaluasi kurikulum yang berfungsi untuk mengukur efektivitas program serta memastikan keberlanjutan perubahan yang terjadi. Evaluasi dilakukan secara komprehensif meliputi aspek kognitif, afektif, perilaku, dan program. Evaluasi kognitif bertujuan mengukur perubahan pemahaman ideologis peserta, sedangkan evaluasi afektif menilai perubahan sikap dan nilai terhadap toleransi dan perdamaian (Miles, Huberman, dan Saldaña 2014). Evaluasi perilaku berfokus pada perubahan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti

keterlibatan dalam kegiatan sosial dan menjauhi kekerasan, yang menjadi indikator keberhasilan deradikalisasi (Lyons, Lyons, dan Samson 2021). Evaluasi program dilakukan untuk menilai efektivitas kurikulum secara keseluruhan, termasuk metode, fasilitator, dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), sehingga kurikulum tetap adaptif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan peserta (Mennenga 2021). Pendekatan evaluasi berbasis bukti ini menjadi penting dalam memastikan bahwa program deradikalisasi tidak hanya berhasil secara jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain tahapan manajerial, bagan tersebut juga menampilkan komponen utama kurikulum deradikalisasi yang terdiri dari lima dimensi, yaitu ideologis, nilai dan sikap, keterampilan dan ekonomi, sosial, serta spiritual. Dimensi ideologis berfokus pada rekonstruksi pemahaman keagamaan yang moderat dan kontra narasi terhadap ideologi radikal. Dimensi nilai dan sikap menekankan pada penguatan toleransi, empati, dan komitmen terhadap kemanusiaan. Dimensi keterampilan dan ekonomi bertujuan menciptakan kemandirian melalui pelatihan vokasional dan kewirausahaan. Dimensi sosial berorientasi pada reintegrasi dalam masyarakat dan pembangunan relasi sosial yang positif. Sementara itu, dimensi spiritual menekankan pada pembinaan akidah wasathiyah dan praktik keagamaan yang moderat. Kelima dimensi ini menunjukkan bahwa deradikalisasi melalui pendidikan harus dilakukan secara multidimensional dan tidak dapat dipisahkan antara aspek ideologis dan sosial-ekonomi (Hasan dan Rahim 2023; Rabasa et al. 2019).

Output dari keseluruhan proses ini adalah perubahan ideologis dari radikal menjadi moderat, terbentuknya sikap toleran dan inklusif, munculnya perilaku positif, tercapainya kemandirian ekonomi, serta keberhasilan reintegrasi sosial peserta sebagai agen perdamaian. Hasil ini sejalan dengan temuan bahwa program deradikalisasi yang berbasis pendidikan dan pemberdayaan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam jangka panjang dibandingkan pendekatan

represif semata (Kruglanski et al. 2021). Selain itu, prinsip pengelolaan yang ditampilkan dalam bagan, yaitu partisipatif, integratif, kontekstual, berkelanjutan, dan berbasis bukti, menegaskan bahwa manajemen kurikulum deradikalisasi harus melibatkan berbagai pihak, mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan, serta didasarkan pada data empiris dan evaluasi berkelanjutan (Nurdin 2020; Mennenga 2021).

Manajemen kurikulum dalam pendidikan deradikalisasi bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan strategi transformasi sosial yang kompleks dan berkelanjutan. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan deradikalisasi sangat bergantung pada kemampuan lembaga pendidikan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum secara holistik dan adaptif terhadap konteks sosial peserta. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya relevan bagi YLP, tetapi juga dapat menjadi model konseptual yang dapat direplikasi oleh lembaga lain dalam upaya membangun masyarakat yang damai, toleran, dan inklusif di Indonesia.

### **Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan Deradikalisasi: Menjembatani Kesenjangan Antara Teori Toleransi Dan Praktik Lapangan**

Tabel 1 Implementasi Teori Toleransi Dan Praktik Lapangan

<b>Teori (APA 7)</b>	<b>Indikator</b>	<b>Manajemen Kurikulum dalam Pendidikan Deradikalisasi (APA 7)</b>	<b>Praktik Lapangan (YLP) (APA 7)</b>
<b>Teori Kurikulum Transformatif (Mezirow, 1991)</b>	<b>1. Refleksi kritis terhadap keyakinan lama</b>	Kurikulum dirancang untuk mendorong evaluasi kritis terhadap ideologi radikal melalui pembelajaran reflektif dan pengalaman	Diskusi reflektif, muhasabah, dan sharing pengalaman eks napiter dalam memahami dampak radikalisme (Hasil wawancara & observasi, 2025)
	<b>2. Dialog dan rekonstruksi pemahaman</b>	Pembelajaran berbasis dialog untuk membangun pemahaman moderat	Dialog keagamaan, kajian tafsir damai, kontra narasi ideologi

		dan toleran (Kruglanski et al., 2021)	radikal (Dokumentasi YLP, 2025)
	<b>3. Perubahan perspektif (transformasi ideologi)</b>	Integrasi nilai moderasi beragama dalam kurikulum untuk mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif (Nurdin, 2020)	Perubahan sikap peserta menuju penerimaan keberagaman dan komitmen terhadap NKRI (Wawancara informan, 2025)
	<b>4. Tindakan sosial baru</b>	Kurikulum diarahkan pada pembentukan perilaku sosial positif berbasis komunitas (Lyons et al., 2021)	Keterlibatan dalam kegiatan sosial, dakwah damai, dan partisipasi masyarakat (Observasi lapangan, 2025)
	<b>5. Pemberdayaan individu</b>	Penguatan aspek keterampilan dan ekonomi sebagai bagian kurikulum deradikalisasi (Rabasa et al., 2019)	Pelatihan kewirausahaan, usaha mandiri, dan program ekonomi produktif eks napiter (Dokumentasi YLP, 2025)

Sumber: Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian di Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP), 2025.

Manajemen kurikulum dalam pendidikan deradikalisasi secara konseptual berlandaskan pada Teori Kurikulum Transformatif yang menekankan perubahan perspektif individu melalui refleksi kritis dan dialog sebagai inti proses pembelajaran (Mezirow, 1991). Dalam konteks deradikalisasi, pendekatan ini sangat relevan karena individu yang terpapar ideologi ekstrem membutuhkan rekonstruksi pemahaman secara mendalam, tidak hanya pada aspek kognitif tetapi juga afektif dan sosial (Kruglanski et al., 2021). Refleksi kritis memungkinkan peserta mengevaluasi keyakinan lama yang bersifat radikal, sementara dialog menjadi medium untuk membangun pemahaman baru yang lebih moderat dan toleran (Hasan & Rahim, 2023).

Perubahan perspektif ini menunjukkan keberhasilan transformasi ideologi dari eksklusif menuju inklusif yang selaras dengan nilai moderasi beragama (Nurdin, 2020), yang kemudian diwujudkan dalam tindakan sosial baru seperti keterlibatan

aktif dalam kegiatan masyarakat yang damai dan konstruktif (Lyons et al., 2021). Selain itu, pemberdayaan individu melalui penguatan ekonomi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan proses deradikalisasi, karena kemandirian ekonomi terbukti berkontribusi dalam menurunkan risiko re-radikalisasi (Rabasa et al., 2019). Dalam praktiknya, Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) mengimplementasikan seluruh indikator tersebut melalui kurikulum holistik yang mencakup dialog keagamaan, pembinaan spiritual, kegiatan sosial, serta pelatihan kewirausahaan.

Data empiris menunjukkan bahwa lebih dari 120 mantan narapidana terorisme yang mengikuti program ini mengalami perubahan signifikan menuju sikap moderat, peningkatan partisipasi sosial, serta kemandirian ekonomi sebagai indikator keberhasilan deradikalisasi yang berkelanjutan (Soniya & Yani, 2022; hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 2025). Dengan demikian, manajemen kurikulum deradikalisasi di YLP tidak hanya mengoperasionalkan teori transformasi secara aplikatif, tetapi juga berhasil menjembatani kesenjangan antara teori toleransi dan praktik lapangan secara nyata, kontekstual, dan berdampak pada pemulihan ideologis serta sosial peserta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Manajemen kurikulum dalam pendidikan deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara teori toleransi dan praktik lapangan melalui pendekatan yang holistik, integratif, dan berbasis transformasi. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi sebagai instrumen perubahan ideologis, perilaku, dan sosial yang diwujudkan melalui refleksi kritis, dialog, transformasi perspektif, tindakan sosial, serta pemberdayaan ekonomi. Implementasi yang sistematis pada aspek desain, pelaksanaan, dan evaluasi menunjukkan bahwa keberhasilan deradikalisasi sangat ditentukan oleh integrasi nilai moderasi beragama, keterlibatan komunitas, serta

keberlanjutan program. Dengan demikian, model manajemen kurikulum YLP dapat diposisikan sebagai kerangka konseptual dan praktis yang efektif dalam membangun individu moderat, toleran, dan mampu berintegrasi kembali dalam masyarakat secara produktif.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan kebijakan dan dukungan institusional untuk mengembangkan model manajemen kurikulum deradikalisasi berbasis pendidikan secara lebih luas dan sistematis. Secara akademik, penelitian lanjutan disarankan untuk menguji model ini pada konteks lembaga lain guna memperkuat generalisasi dan pengembangan teori. Secara praktis, lembaga pendidikan dan organisasi terkait perlu mengadopsi pendekatan kurikulum yang integratif antara aspek ideologis, sosial, dan ekonomi. Sementara itu, pada tingkat kebijakan, pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan dukungan berkelanjutan dalam bentuk regulasi, pendanaan, serta kolaborasi lintas sektor guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program deradikalisasi berbasis pendidikan di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Biyanto. (2023). Religious moderation and its challenges in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 17(1), 25–45.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (2014). *Introduction to qualitative research methods*. Wiley.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Hasan, N., & Rahim, R. (2023). Community-based peace education and social reintegration. *Journal of Peace Education*, 20(1), 45–60.
- Khoiri, A., & Farihah, I. (2023). Community empowerment in deradicalization programs. *Journal of Social Studies Education Research*, 14(2), 112–130.
- Kruglanski, A. W., Bélanger, J. J., & Gunaratna, R. (2021). *The three pillars of radicalization: Needs, narratives, and networks*. Oxford University Press.

- Kisbiyanto. (2016). Pendidikan toleransi dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 180–195.
- Lyons, M., Lyons, S., & Samson, T. (2021). Reintegration and desistance from violent extremism. *Terrorism and Political Violence*, 33(1), 120–138.
- Maulana, A. (2022). Transformasi ideologi dalam program deradikalisasi. *Jurnal Studi Keamanan*, 8(1), 1–15.
- Mezirow, J. (1991). *Transformative dimensions of adult learning*. Jossey-Bass.
- Mennenga, E. (2021). Multi-stakeholder collaboration in countering violent extremism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 44(5), 389–405.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyadi, M., & Kurniawan, A. (2022). Post-prison deradicalization and reintegration challenges. *Journal of Southeast Asian Studies*, 37(2), 210–230.
- Nurdin, A. (2020). Religious moderation in Indonesian education. *Journal of Indonesian Islam*, 14(2), 345–368.
- Onapajo, H., & Ozden, K. (2020). Youth radicalization and education. *African Security Review*, 29(1), 10–20.
- Posner, G. J. (1995). *Analyzing the curriculum*. McGraw-Hill.
- Rabasa, A., Pettyjohn, S. L., Ghez, J. J., & Boucek, C. (2019). *Deradicalizing Islamist extremists*. RAND Corporation.
- Saputra, N. A., et al. (2021). Moderasi beragama dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 290–305.
- Sahar, A., & Kaunert, C. (2024). Counter-terrorism and deradicalization strategies. *Journal of Policing and Security*, 12(1), 50–67.
- Soniya, R., & Yani, A. (2022). Peran Yayasan Lingkar Perdamaian dalam deradikalisasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(1), 1–20.
- Subarkah, A., Rachman, J. B., & Akim. (2020). Pendidikan perdamaian berbasis komunitas. *Journal of Peace Studies*, 5(2), 80–95.
- Ulfiyatun. (2015). Terorisme di Indonesia dan dampaknya. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 70–85.
- Yasini, M., & Yurman. (2017). Dampak psikologis terorisme. *Jurnal Psikologi Sosial*, 9(1), 35–45.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Az Zafi, A. (2020). Moderasi beragama dalam perspektif Islam. *Jurnal Studi Islam*, 15(1), 40–55.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Kementerian Agama RI.
- Fraser-Rahim, H., & Khalid, S. (2021). Teaching tolerance in diverse societies. *International Journal of Education*, 13(2), 170–185.
- Gregersen, A. (2020). Community-based deradicalization programs. *Global Security Review*, 6(1), 90–105.